

Daftar Pustaka

- Aliyah, I., Daryanto, T. J., & Jani Rahayu, M. (2007). Peran Pasar Tradisional dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta. *Gema Teknik Majalah Ilmiah Teknik*, 10(2), 111-118.
- Andriani, M. N., & Ali, M. M. (2013). Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 2(2), 252-269.
- Araujo, E. B. (2016). Pengembangan Kuliner Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata Di Dili, Timor Leste. *Jurnal Master Pariwisata (Jumpa)*.
- Ariyani, N. (2019). Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia Berdasarkan Teori “Von Stufenaufbau De Rechtsordnung”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Fakfak. (2020). Distrik Kokas Dalam Angka 2020. Fakfak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak.
- Choerudin, A. (2018). Model Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Partisipasi Masyarakat: Studi Empiris di Indonesia.
- Fatimah, M., & Afifuddin, M. (2013). Modal Sosial Pedagang Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(2), 4-19.
- Halik, A. (2014). Peran Pemerintah Kota Serang Dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional. *Jurnal Bina Praja: Journal Of Home Affairs Governance*, 6(2), 83-100.
- Hartejo, D. R. (2013). Wisata Pasar Ikan Puger Di Jember. *Edimensi Arsitektur Petra*, 1(1).
- Istijabatul, Aliyah. (2017). Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan. *Cakra Wisata*, 18 (2), 1-16.
- Izudin, A. (2012). Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional Di Bantul (Analisis Pemberdayaan Masyarakat). Skripsi (Tidak Diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Sunan Kalijaga
- Jatmika, P. P. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 5(2), 35-47

- Kupita, W., & Bintoro, R. W. (2012). Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 45-59.
- Kusumedi, P., & HB, A. R. (2010). Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 179-193.
- Labolo, M. (2011). Memahami ilmu pemerintahan. Rajagrafindo : Jakarta.
- Lathifah, A. A., & Widayati, W. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional Di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12,(3), 479-490
- Latupapua, Y.T. (2015). Implementasi Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri*. 10 (1). 21-30.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J., (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance*, 5(1)
- Nida, M. M. (2014). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(2), 166-174.
- Pamardhi, R. (1997). Planing for Traditional Javanese Markets in Yogyakarta Region. Sydney: University of Sydney.
- Poesoro. (2007). Pemberdayaan pasar tradisional dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surakarta
- Pramudyo, A. (2014). Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 2,(1).
- Putra, I. W. D. S., Pemayun, C. I. A., & Satyawati, N. G. A. D. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pasar Seni Sebagai Destinasi Pariwisata di Kabupaten Gianyar. Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum*.

- Roikhatun, Aflaha. (2015). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam. Diss. IAIN Purwokerto.
- Saifuddin, Azwar. (2005). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwoko, E. (2008). Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 4(2), 97-115.
- Sastradipoera, K. "Pasar Sebagai Etalase Harga Diri", dalam Ajip Rosidi, dkk (eds). (2006). *Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2)*. Jakarta: Yayasan Kebudayaan Rancage
- Satriawan, B., & Abdillah, S. (2011). Revitalisasi Pasar Tradisional dan Peran Pemerintah Untuk Meminimalkan Kesenjangan Ekonomi. *Media Trend*, 6(1), 83-92.
- Seran, M. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 389-395.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumaria, A. (2014). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*
- Sumilat, R. D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi Di Pasar Langowan). *Jurnal Politico*, 10(3).
- Sururi, A. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 4(3).
- Turnip, D. E., Adhi, S., & Harsasto, P. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(02), 171-180.

Wati, L. (2013). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional (Study Kasus Pada Pasar Pagi Arengka Pekanbaru). Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wibowo, A. A. (2011). Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Peterongan Semarang) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Negeri Semarang).

Widiyanto, R. (2009). Indonesian Culture. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 62 tahun 2017 Tentang Restrukturisasi Kelembagaan

Wawancara Informan

Uswanas, M. 2021. (IF01). Wawancara tanggal 4 Maret 2021 di Kantor Bupati Fakfak

Asmorojati, W. 2021. (IF02). Wawancara tanggal 8 Februari 2021 di Kantor Bapeda dan Litbang Kabupaten Fakfak

Talla, C. 2021. (IF03). Wawancara tanggal 10 Februari 2021 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak

Hindom, J. 2021. (IF04). Wawancara tanggal 12 Februari 2021 di Kantor Distrik Kokas

Wagab, Y. 2021. (IF05) Wawancara tanggal 7 Juni 2021 di Kampung Mambunibuni

Hegemur, B. 2021. (IF06). Wawancara tanggal 20 Februari 2021 di lokasi Pasar Tradisional Mambunibuni

Herobat, K. 2021. (IF07). Wawancara tanggal 20 Februari 2021 di lokasi Pasar Tradisional Mambunibuni

Bahba, S. 2021. (IF08). Wawancara tanggal 20 Februari 2021 di lokasi Pasar Tradisional Mambunibuni